

BAB III
STRATEGI ASNLF DALAM UPAYANYA MEMERDEKAKAN ACEH
DARI INDONESIA

Mengupayakan Aceh bebas dari Indonesia merupakan tujuan dari gerakan ASNLF, *political entrepreneurs* dalam gerakan ini terus berupaya memperluas jaringan transnasional ke seluruh penjuru demi menunjukkan eksistensinya dalam mempengaruhi aktor politik internasional. Adapun, tujuan utama TAN adalah untuk mempengaruhi perilaku negara dengan klaim dan isu yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95).

TAN mencari pengaruhnya dalam banyak hal seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau elemen lainnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). Di mana jaringan tersebut tidak kuat pada sentralitas militer dan ekonomi, tetapi menggunakan strategi informasi untuk mengubah perilaku sebuah negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95).

Menurut Keck & Sikkink, dalam sebuah kampanye ini jaringan dapat menggunakan satu taktik secara bersamaan ataupun pelbagai tipologi secara bersama (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). Maksud dari tipologi ini, untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh. Maka dalam bab ini, penulis akan menganalisis upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh dari Indonesia, terutama menjelaskan mengapa ASNLF belum tercapainya proses kemerdekaannya dari tahun 1999-2019 dengan menggunakan empat tipologi taktik *Transnational Advocacy Network* (TAN).

3.1 Taktik Gerakan ASNLF Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori *Transnational Advocacy Network*

TAN melampirkan bahwa terdapat empat tipologi taktik yang biasanya digunakan dalam jaringan advokasi ini untuk mencapai tujuannya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). (1) *Information politics* yakni upaya TAN dalam memindahkan informasi secara politik dan kredibel ke arena yang memiliki *effect* yang besar (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). (2) *Symbolic politics* yakni upaya TAN dalam mengadvokasikan sebuah isu melalui simbol dan cerita yang menjurus pada tuntutan advokasi kepada audiens, terutama meminimalisir jarak-jarak yang jauh (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). (3) *Leverage Politics* yakni upaya TAN dalam menyuarakan dan menarik aktor-aktor yang lebih kuat untuk membantu menekan ‘aktor target’ dari luar (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). (4) *Accountability politics* yakni upaya TAN menjaga aktor yang telah mendukung dan mengikuti prinsip dan nilai bersama setelah advokasi berhasil diselesaikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95).

3.1.1 *Information Politics* dalam Gerakan ASNLF

Munculnya gerakan ASNLF ini tidak terlepas dari peran *political entrepreneurs* dalam membentuk sebuah masalah dan menyebarkan informasi yang provokatif. Ditambah juga dengan doktrinisasi yang ditulis oleh gerakan ASNLF untuk disebarkan kepada masyarakat Aceh, merupakan momentum *grassroots* dari informasi dasar yang menyebabkan mereka ikut andil dengan gerakan ini. Di mana informasi merupakan hal yang sangat strategis dalam membantu dan menjelaskan terciptanya sebuah jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96).

Terbentuknya jaringan tidak terlepas dari struktur komunikatif, sehingga informasi menjadi tumpuan penting dalam taktik strategis untuk mengefektifitaskan jaringan. *Information politics* yakni upaya TAN dalam memindahkan informasi secara politik dan kredibel ke arena yang memiliki *effect* yang besar (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). Terhubungnya informasi yang umum di antara jaringan transnasional merupakan cara untuk memperkuat jaringan ini (Keck & Sikkink, 1998, hal. 92).

Menurut Keck & Sikkink, bahwa media merupakan mitra yang cukup penting dalam melancarkan politik informasi melalui jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96). Akan tetapi, kesaksian yang diceritakan kepada orang-orang yang merasakan konsentrasi masalah serupa merupakan bentuk stimulasi agar dukungan dapat diraih atas perjuangan dari jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96). Sehingga nantinya akan ditangkap oleh perhatian pers termasuk jurnalis yang akan menjadi bagian dalam membantu menyebarkan informasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96).

3.1.1.1 Fase Hasan Tiro 1999-2005

Kedatangan pertama Hasan Tiro ke Aceh pada 30 Oktober 1976 secara diam-diam dan ilegal kewarganegaraan memang tidak terlepas dari maksudnya untuk menyebarkan informasi ke masyarakat Aceh (Akbar, 2009, hal. 55). Sebelum berangkat ke Aceh, beliau sudah menyiapkan beberapa tulisan yang sudah di cetak banyak di Malaysia untuk disebar. Ketika sampai di Pidie, Gunung Halimun, pendeklarasian *Acheh Sumatra Nationional Liberation Front* (ASNLF) mulai dilakukan pada tanggal 4 Desember 1976 (Akbar, 2009, hal. 55). Kontak dan informasi sudah dikoordinasikan dengan aktivis lainnya yang lebih dahulu sudah

bergabung (Akbar, 2009, hal. 55). Mereka telah menyiapkan beberapa anggota militer yang siap untuk diberikan ilmu. Hasan Tiro terus melakukan doktrin, seperti aksi pengajar dosen (Akbar, 2009, hal. 55). Hal ini dibenarkan oleh Ayah Gani selaku GAM angkatan pertama, jika pada tahun 1977 selebaran *Atjèh Bak Mata Dônja* mulai dilakukan sampai ke orang-orang Aceh di Medan, dengan harapannya metode perekrutan satu orang mengajak sepuluh orang lainnya (Laksono, 2017).

Informasi selanjutnya, selain propaganda dalam memuji kejayaan sejarah Aceh, juga melancarkan isu bahwa orang Jawa melakukan “pencurian” terhadap kekayaan mineral di wilayah Aceh (Ross, 2005, p. 27). Iklan-iklan yang dibicarakan pada fase ini adalah jika Aceh merdeka, Negara ini akan sekaya Brunei Darussalam akan kaya minyaknya (Ross, 2005, p. 27). Tidak hanya daya tarik politik, namun ekonomi juga dimainkan dalam pola mengemas sebuah isu. Informasi yang dilancarkan adalah menyamakan dengan kondisi Brunei Darussalam. Sebagaimana Brunei yang kaya, akan tetapi mereka kurang demokratis, sedangkan Aceh jika merdeka secara fiskal di tahun 1999 PDP per kapitanya akan menjadi \$ 1.257 atau tiga tingkat lebih tinggi dari PDB rata-rata Indonesia (Ross, 2005, p. 27).

Selain itu, upaya dalam memobilisasi opini publik terhadap orang Indonesia juga dilakukan, memprovokasi dan mengancam tindakan represif militer Pemerintah terhadap gerakan ASNLF dan masyarakat (Ross, 2005, p. 28). Provokasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan masyarakat kepada gerakan ini. Seturut apa yang dikatakan oleh Ilyas Pase yaitu komandan GAM dalam sebuah wawancara dengan seorang jurnalis Inggris:

“Kami tahu dari pengalaman bagaimana aparat keamanan menanggapi kegiatan kami. Mereka akan membunuh warga sipil dan membakar rumah masyarakat. Ini membuat orang lebih loyal kepada GAM. Dan orang-orang

di Jakarta dan di luar dapat melihat keseriusan perjuangan kita. Ini adalah bagian dari strategi gerilya kami” (Ross, 2005, p. 27).

Alih-alih dari sekumpulan masyarakat berdampak luas kepada perekrutan anggota ASNLF. Justru adanya wacana ingin merdeka dari ASNLF tidak terlepas dari mengakarnya aksi dan unjuk rasa menuntut referendum kepada Pemerintah Indonesia tahun 1999. *Political entrepreneurs* fase Hasan Tiro ini sangat lancar melakukan informasi politik dan berbuah pada terbentuknya Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dengan opsi yang sama ingin merdeka (Tirto, 2017). Hal ini juga didukung penuh oleh Ulama dayah Se-Aceh, mendesak pemerintah melaksanakan referendum di Aceh sebagai jalan tengah (Kawilarang, 2010, p. 9). Dapat dikatakan dengan kemunculan ASNLF dalam upaya *grassroots* politik informasinya, berhasil dan menghasilkan dukungan serta simpatik besar dari masyarakat Aceh.

Namun, seketika Timor Timur telah lepas menjadi negara pada tahun 1999 semasa Pemerintah Indonesia tengah dikendali Presiden BJ Habibie, ASNLF mulai getar getir. Mereka ikut terbius dengan Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur, ketika pelanggaran HAM ini menjadi perhatian dunia internasional, dan alasan Indonesia pun ikut tertekan dengan hal itu, akibatnya Timor Timur lepas (Dokumenter Watchdoc, 2017).

ASNLF tertarik pada saat itu, untuk menerima perundingan *Cessation of Hostilities* (COHA) dengan Indonesia pada 18 Mei 2003, di Tokyo. Terutama tetap fokus dalam mendorong kemerdekaan daripada otonomi yang diberikan Indonesia (Sherlock, 2003). Dalam pertemuan di Gedung Japan International Cooperation Agency, Tokyo, Juru Runding ASNLF Malik Mahmud mengatakan siap melawan

TNI (Liputan6, 2003). Sama dengan selang waktu sebelumnya pada dialog pertama antara kedua belah pihak ini ketika di Jenewa, Swiss (Djumala, 2013, hal. 41). Menurut Aspinal, perundingan ini memang dengan sengaja untuk dipertunjukkan, karena ASNLF ingin berjuang untuk menarik perhatian dunia internasional dan mem-*blow up* isu ini agar *goes international*, terkhusus bagi media-media asing juga (Aspinall, 2005, hal. 46). Akibatnya, perundingan memang sudah di-*setting* untuk gagal dilakukan (Djumala, 2013, hal. 43).

Namun nasib ini tidak sama seperti Timor timur, tidak mudah hal ini disorot oleh perhatian media, berhubung tidak lama salah satu wilayah di Indonesia sudah lepas. Adapun kalkulasinya sangat sedikit dalam pemberitaan internasional dan tidak dapat menekan perlakuan Pemerintah Indonesia di fase ini. Seperti yang dilakukan oleh William Nessen sebagai Reporter Journey Pictures, dia terhambat ketika ikut dalam pemberontakan GAM untuk meliput pemberitaannya, agar dapat diterbitkan menjadi *documentary* dalam medianya. Sebab, Pemerintah Indonesia dengan cepat mendengar kabar itu untuk memperingatkan kepada William Nessen agar kembali ke negara asalnya dan tidak bertanggung jawab apabila keselamatannya terancam (BBCNews, 2003).

3.1.1.2 Fase Arif Fadillah 2012-2019

Pasca MoU Helsinki, gerakan ASNLF di bawah kendali Arif Fadillah dan aktivis lainnya justru memiliki peluang besar dalam melancarkan informasi politik. Namun dalam beberapa agenda internasionalnya politik informasi mulai sedikit kendur di masa-masa Pemerintahan SBY dan Jokowi. Benar jika, Keck & Sikkink mengatakan bahwa jurnalis dapat bergabung dalam bagian jaringan ini untuk

memupuk reputasi dengan pers, agar dapat mem-*blow up* isu untuk menarik perhatian pers lainnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96).

Seperti aktivitas yang dilakukan oleh ASNLF, beberapa anggotanya berinisiatif menjadi bagian yang menyebarkan isu atau jurnalis dalam gerakan ini dan diterbitkan di dalam website, facebook dan youtube (ASNLF Official, 2012). Termasuk beberapa agenda unjuk rasa dan konferensi internasional yang diadakan oleh UNPO. Mereka juga berafiliasi dengan media-media lokal di Aceh dalam menaikkan pemberitaannya.

Justru hal ini menjadi berbeda, sebab gerakan ASNLF fase ini tidak dapat menarik dukungan dan simpatik masyarakat lewat pengaruhnya melalui informasi politik dari berbagai *platform*. Perhatiannya pada media lokal tidak mampu disoroti oleh media nasional maupun media internasional. Alhasil, bertumpuknya pemberitaan tidak didapat untuk mempengaruhi simpatik masyarakat Aceh.

Dari kontribusi media dalam mempublikasikan isu, maka diperlukan sumber informasi untuk memperluas jaringan agar dapat membantu legitimasi mereka dalam memobilisasi informasi di sekitar dengan maksud merubah menarik dukungan luar hingga menekan perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96). Adapun, fase Hasan Tiro 1999-2005 memiliki basis simpatik yang besar, akan tetapi mereka kesulitan dalam menembus informasi ke luar agar dapat disorot dengan tujuan menekan Pemerintah Indonesia. Sedangkan, fase Arif Fadillah terbuka peluangnya untuk menekan pemerintah lewat informasi dan isu yang dikemas, akan tetapi simpatik masyarakatnya belum dapat diraih. Hal ini sangat diperlukan untuk memobilisasi opini masyarakat, agar jaringan ini mendapatkan dukungan dari domestik dan internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96).

3.1.2 *Symbolic Politics* dalam Gerakan ASNLF

Political entrepreneurs berusaha untuk mengemas masalah dengan peristiwa simbolik, agar pada keberlanjutannya dapat menjadi katalis sebagai perkembangan jaringannya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96). *Symbolic politics* yakni upaya TAN dalam mengadvokasikan sebuah isu melalui simbol dan cerita yang menjurus pada tuntutan advokasi kepada audiens, terutama meminimalisir jarak-jarak yang jauh (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95). Taktik tipologi ini saling berhubungan dengan informasi politik. Melihat efektifitas mereka dalam menggunakan simbol atas klaim yang mereka advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95).

ASNLF sendiri menggunakan *buraq*-singa sebagai simbol dan identitas negara Aceh pada masa silam. Lalu, simbol ini juga digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat dengan maksud untuk merdeka (Piliang, 2010, hal. 30). Sebab, Menurut C. Snouck Hugronje jika identitas dan rasa tinggi terhadap harga diri merupakan identitas yang sangat superior bagi orang Aceh dan masyarakatnya suka dengan kebanggaan terhadap identitasnya (Hugronje, 2019, hal. 377).

3.1.2.1 Fase Hasan Tiro (1999-2005)

Menurut Laclau, dampak-dampak keterlepasan (*dislocatory effects*) telah menyebabkan identitas Aceh terhambat, dan sebaliknya karena hal ini yang akhirnya mendorong terbentuknya nasionalisme dan identitas politik Aceh bisa menjadi wacana ideologi-politik hegemonik (Damanik, 2010, hal. 34). Namun hal ini dipertegas oleh Hasan Tiro, jika tidak hanya sebatas kerasukan pada *romantic*

historis, akan tetapi beliau mengedepankan nilai (*value*), identitas (*identity*), dan harga diri (*dignity*) yang bersifat *intangible* (abstrak) (TheAcehTrend, 2016).

Dalam hal ini, konstruksi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Hasan Tiro merupakan simbolik antara teori dan fakta sejarah, bahwa masalah yang di advokasikan adalah membebaskan diri. Nilai-nilai tersebut menjadi identitas bagi Aceh dan masyarakatnya yang terbungkus dalam semangat nasionalisme. Hasan Tiro telah menuangkan bagian ini ke dalam bukunya yang bertajuk '*The Price Of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro*'.

Gambar 5. *Buraq-singa* dan Bendera Aceh



Sumber: Gambar diambil dari Journal Yusuf (2018)

Pada tingkatan lebih konkret, identitas dan simbol tersebut tertuang dalam *buraq-singa* diadopsi dari kesultanan Aceh Darussalam. *Buraq* sebagai mitologi Islam (*islamic mythology*) berarti sebagai cahaya (Yusuf, 2018, hal. 157). Singa sebagai simbol kedaulatan (*the lion crowned: Symbol of sovereignty of the state of Aceh*), berarti sebagai negara berdaulat dan independen dan memiliki kepala negara dan konstitusi. Sementara bendera memiliki garis hitam artinya kerajaan Aceh sedang dalam kekosongan dan tanda mengingat *syuhada*, warna hitam memiliki makna bahwa perang untuk mencapai kemerdekaan adalah perang suci (Yusuf, 2018, hal. 158). Sedangkan, latar belakang merah memiliki makna bahwa Rakyat

Aceh wajib membela dan mempertahankan yang benar serta menghancurkan yang jahat (Yusuf, 2018, hal. 158). Adapun, bulan sabit dan bintang merupakan bendera yang disimbolkan, Islam sebagai bintang berukun lima dan cahaya iman menandakan bulan (Yusuf, 2018, hal. 158).

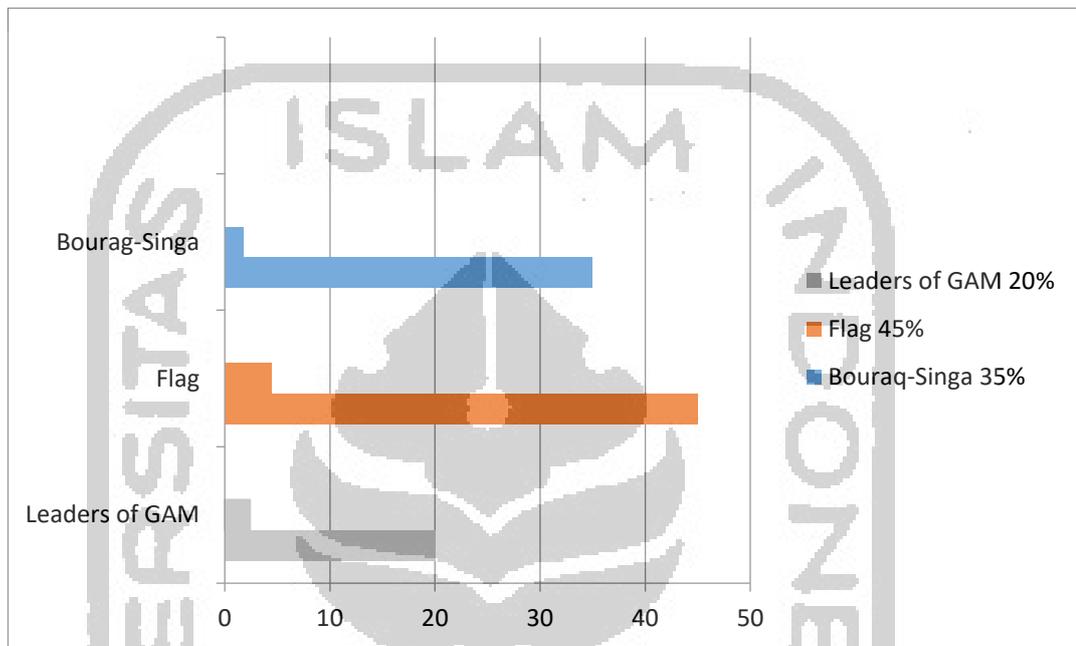
Sementara dalam konteks pergerakan ASNLF, dari dua fase tersebut masih tetap menggunakan simbol yang sama. Dalam surat-surat dan pertemuan yang dilakukan oleh Hasan Tiro juga menggunakan cap *buraq*-singa dan bendera bulan sabit-bintang sebagai identitas dari ASNLF (The Hasan Tiro Center, 2016, 2). Ketika unjuk rasa menuntut referendum 1999 pun, bendera-bendera ini sudah familiar tersebar meluas di masyarakat. Karena simbol-simbol ini bertengger di seragam militer GAM, sebagai halnya dalam cuplikan dokumenter *journeyman pictures* berjudul *The Ethnic Cleansing in Aceh That Nobody Knows About* (Dokumenter Journeyman, 2005). Mereka tampak menggunakan seragam yang memiliki simbol-simbol seperti di atas. Selain itu, pada massa tersebut telah banyak aktivitas pengibaran bendera bulan-bintang dan memainkan sentimen agama dengan semboyan “*hidup adalah sunnah dan mati adalah wajib*”. Provokasi ini menunjukkan bahwa ASNLF memanfaatkan simbolik ini sebagai hal untuk memperkuat perjuangan mereka (Tippe, 2000, hal. 89).

3.1.2.2 Fase Arif Fadillah (2012-2019)

Adapun, simbol-simbol ini masih tetap digunakan oleh ASNLF di fasenya Arif Fadillah, terutama mereka kenakan di dalam *platform* media sosialnya. Selain itu, dalam agenda-agenda internasional dan rapat-rapat internal, mereka tetap menyimbolkan identitas ini di dinding ruangan maupun di tampilan awal video-video yang disebarakan lewat akun youtube ASNLF (ASNLF Official, 2012).

Justru dalam fase ini fanatisme masyarakat masih meningkat terutama dalam studinya yang diolah oleh Rusli Yusuf pada tahun 2016-2017. Adapun, gambar grafiknya sebagai berikut.

Gambar 6. Akun sosial media yang memuat GAM



Sumber Grafik: diolah dari studi *Education and Humanities* Rusli Yusuf (2018)

Pada gambar ini, Rusli Yusuf mengidentifikasi jika *buraq-singa* sebagai lambang merdeka dari gerakan ASNLF atau GAM, dalam simbol ini setiap pengguna facebook akan merasa dendam kepada pemerintah pusat dan rasa fanatik meningkat dari sikap patriotik mereka. Lalu, bendera ASNLF atau GAM pada umumnya dilihat dari pesta Partai Aceh (PA), karena memiliki kemiripan dengan simbol gerakan separatis ASNLF atau GAM. Grafik ini diolah dari berbagai *platform* yang mengandung unsur ASNLF atau GAM, seperti Facebook, Twitter, Group WhatsApp dan Youtube. Mayoritas tertarik dengan simbol bulan-bintang dengan persentase 45% dan simbol *buraq-singa* menempati urutan kedua 35% selebihnya terpicat dengan tokoh-tokoh GAM sebesar 20% (Yusuf, 2018, hal. 158).

Keberhasilan simbolik dari gerakan ASNLF fase Hasan Tiro dan Arif Fadillah masih menempelkan patriotik tinggi dari masyarakat untuk identitasnya. Bukti ini dapat dilihat dari masa perekrutan anggota sampai pasca MoU Helsinki. Namun, terdapat perbedaan sedikit, tapi jelas mengarah pasca perjanjian, karena suara rakyat untuk merdeka atas dorongan simbolik dari gerakan ASNLF mulai meredup.

Jika melihat soal ini, justru dari tahun 1999-2005 dominannya dukungan masyarakat membawa kepada pertumbuhan jaringan terhadap gerakan ASNLF. Selanjutnya, berlanjut ke perjuangan gerakan ASNLF dari tahun 2012-2019 dukungan dari masyarakat mulai menurun dan belum dapat diraih sepenuhnya, akan tetapi masyarakat masih menempel pada sejarah dan identitas lama. Sebab, menurut Margaret Keck & Kathryn Sikkink, pentingnya *political entrepreneurs* mengemas sebuah isu dengan membawanya ke peristiwa simbolik, sebagai upayanya mendorong pertumbuhan jaringan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 96).

3.1.3 *Leverage Politics* dalam Gerakan ASNLF

TAN melihat bahwa kemampuan jaringan dalam pengaruh politik ini melalui dukungan atas aktor yang kuat sebagai metode mereka untuk mengkampanyekan jaringan dalam mempengaruhi perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). Seterusnya, *political entrepreneurs* berupaya untuk mencari peluang politiknya dalam melobi aktor kuat di luar negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97).

TAN juga menurunkan menjadi dua bagian dalam *leverage politics*, yaitu *moral leverage* dan *material leverage* (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). *Pertama, moral leverage* adalah upaya jaringan advokasi dalam menjadikan perilaku 'aktor

target' sebagai pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). *Kedua, material leverage* adalah upaya jaringan advokasi dapat meraih keuntungan untuk perjuangannya pada ruang isu ekonomi, militer maupun hubungan diplomatik yang bisa berupa uang, barang ataupun lainnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97).

3.1.3.1 Fase Hasan Tiro 1999-2005

Upaya yang dilakukan ASNLF pada fase ini, target *moral leverage*-nya belum sepenuhnya tercapai untuk mendekatkan aktor kuat akan menysasar pada perilaku negara ke gerakan ini, terkhusus fokus membantu agenda kemerdekaannya. Sementara kedatangan Henry Dunant Centre pada tahun 1999, merupakan itikad negara untuk mulai membuka dialog dengan ASNLF. Walaupun gerakan ini memiliki maksud berbeda untuk menerima dialog ini. Terutama, menandatangani dokumen *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Jeda Kemanusiaan) pada 12 Mei 2000 di Jenewa, Swiss. Sebagai strateginya untuk melemahkan kekuatan TNI di Aceh (Djumala, 2013, hal. 42).

Adapun, pada masa ini peran UNPO belum signifikan dalam memfasilitasi dan membantu aktivitas gerakan ASNLF. Ditambah dengan perpecahan faksi di gerakan ini pada masa tersebut yang mulai fokus pada perundingan damai, namun bukan pada proses kemerdekaan. Faksi tersebut mulai membajak gerakan ini, sebagai perwakilan penuhnya dalam melegitimasi keputusan (Ali, 2019). Sebab itu, perpecahan membawa pada hambatan untuk menarik dan mengundang aktor seperti UNPO semakin sulit dicapai.

Namun pada tahun 2004, Amnesty international melaporkan tindakan pelanggaran HAM di Aceh dan diajukan kepada Pemerintah Indonesia dan PBB.

Mereka sudah menyoroti kasus ini dari jauh sebelum laporan ini keluar. Laporan tersebut juga mengatakan, tidak ada badan PBB diberikan izin untuk mengunjungi wilayah Aceh dari Pemerintah Indonesia. Mereka pun membisu di depan umum ketika laporan mengenai pelanggaran HAM mulai naik ke permukaan. Bahkan, sekelas Amerika Serikat pada bulan februari 2004 secara terbuka mengecam penangkapan dan pelanggaran HAM di Indonesia. (Amnesty International, 2004)

Selain itu, dari segi *material leverage* ASNLF mulai melakukan ini semasa perjuangan dimulai sampai pada pasca reformasi Indonesia, iuran-iuran wajib dari desa-desa, sumbangan beras dan sembako lainnya, pemasukan tanaman ganja dan kewajiban membayar *pajak nanggroe aceh* (pajak negara Aceh) sangat membantu proses pertumbuhan gerakan ini, terutama untuk pembelian senjata ilegal (Missbach, 2012, hal. 153).

Mereka para *political entrepreneurs* ASNLF di pengasingan juga ikut menggalang dana secara internal sampai berakhirnya konflik, tugas-tugas ini diserahkan kepada pemimpin setempat (Missbach, 2012, hal. 153). Terutama bagi mereka yang sedang di luar negeri, juga memungut sumbangan dari dompet perseorangan di Malaysia bisa mencapai MYR 100.000 (US \$ 28.000) atau bisa MYR 400.000 (US \$ 112.000), meskipun mereka sebagai donatur sedikit kaya mereka mampu. Sementara, iuran bulannya di Malaysia mencapai MYR 20 (US \$ 6) (153 Misbach). Namun jika di Eropa, penarikan ini jauh lebih besar. Seperti di Denmark, iuran bulanan berkisar DKK 150 (US \$ 32) dan DKK 50 (US \$ 105), di Swedia, warga Aceh harus membayar SEK 500 (US \$ 84) per bulan, di Norwegia, iuran rutin bulan berkisar antara NOK 500 (US \$ 100) per keluarga, di Amerika Serikat, sumbangan bulanan berkisar US \$ 50 dan US \$ 200 Per bulan (Missbach,

2012, hal. 155). Sampai kepada pemerasan dari perusahaan ExxonMobil di daerah Lhoksemawe untuk mengurangi pendapatan gas Pemerintah dengan mengumpulkan sekitar lima miliar rupiah (\$ 500.000) (Tempo, 2001). Hal ini dibenarkan oleh Yusra Abdul Gani, jika mereka terus memberikan ancaman kepada perusahaan yang ada di Aceh (Gani, 2019).

Pengutipan ini dilakukan untuk proses perjuangan gerakan ASNLF dan untuk menumbuhkan pergerakan. Dimulai dari proses politik dan diplomasi mereka di dunia internasional, lalu sampai pada kepentingan kombatan militer di Aceh (Gani, 2019).

3.1.3.2 Fase Arif fadillah 2012-2019

Sementara untuk fase 2012-2019 dalam gerakan ASNLF, *moral leverage* lebih jelas. Mereka lebih terbuka pada khalayak umum, terutama pendekatan internasionalnya lebih preventif. Mengutamakan diplomasi terlebih dahulu untuk menyoroti persoalan besar di Aceh dalam perkara HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Ali, 2019). Sebagai caranya dalam menarik perhatian dunia pada 'aktor target' yakni Indonesia.

Perkara-perkara ini sudah berhasil mereka bawa kembali ke forum-forum internasional seperti PBB, EU dan lainnya melalui organisasi UNPO (Ali, 2019). Kegiatan ini tidak terlepas dari pengaruh politik yang digencarkan oleh gerakan ASNLF melalui eksistensinya di Eropa. Lalu, gerakan ASNLF secara terang-terangan berani menentang Indonesia dalam forum-forum internasional yang difasilitasi UNPO (JurnalAceh, 2016). Mereka juga berhasil memainkan peran UNPO dalam membantu jalannya perjuangan gerakan ASNLF.

Walaupun ASNLF saat ini kesulitan untuk menarik dukungan dari negara-negara berdaulat, karena kesusahan dalam menebak negara tersebut untuk mendukung pergerakan mereka (Ali, 2019). Sebab, negara tersebut masih punya hubungan diplomasi dengan Indonesia (Ali, 2019). Demikian juga dengan NGO internasional lainnya selain UNPO, mereka tidak terbuka dalam memberikan sokongan politik kepada ASNLF kecuali perkara HAM (Ali, 2019).

Selain itu, *material leverage* dalam gerakan ASNLF fase ini hanya dapat terkumpul dari keanggotaan yang ada di Eropa. Selebihnya, mereka tidak dapat menarik iuran wajib seperti Pra MoU Helsinki. Sebab, masyarakat sudah mulai meredup simpatiknya pada gerakan ASNLF, bahkan masih banyak belum mengenal dengan keberadaan gerakan ini.

Menurut Keck & Sikkink, *political entrepreneurs* harus kritis terhadap pengaruh politiknya yang efektif untuk melibatkan aktor kuat di dunia internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). Kendati, ASNLF pada fase 1999-2005 juga tidak berfokus lagi dalam menarik pengaruh organisasi internasional dan negara pendukung untuk ikut andil dalam menekan Pemerintah. Mereka sudah mendekati pada keinginan untuk berdamai, sehingga melupakan membentangkan bukti jika Aceh ingin merdeka dalam dialog tersebut (Gani, 2019). Sebab, bukti kemerdekaan tersebut telah kuat menurut hukum dan dokumen-dokumen yang ditemukan oleh gerakan ASNLF (Gani, 2019). Adapun, kekuatan aktor internasional selain PBB dan UNPO tidak dapat membantu dan menekan pemerintah untuk membuka diri dalam proses membicarakan kemerdekaan Aceh. Sedangkan, fase Arif Fadillah cenderung terbuka dalam pengaruh politiknya dalam menarik aktor kuat seperti UNPO, tapi peranannya belum kuat dalam menekan Pemerintah Indonesia. Sebab,

TAN melihat bahwa kemampuan jaringan dalam pengaruh politik ini melalui dukungan atas aktor yang kuat sebagai metode mereka untuk mengkampanyekan jaringan dalam mempengaruhi perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97).

3.1.4 *Accountability Politics*

TAN dalam politik akuntabilitas merupakan taktik jaringan yang digunakan untuk ‘aktor target’ yaitu negara telah menyetujui kesepakatannya merubah kebijakan atau perilaku dari masalah yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). Maka jaringan mempunyai kesempatan besar terhadap politik akuntabilitas dalam menjaga wacana dan praktik dari kesepakatan yang dilakukan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97). *Accountability politics* bertujuan untuk menjamin implementasi dari perubahan yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang ada, sebab Pemerintah kerap menyepakati kesepakatan hanya untuk menjauh dari perhatian publik (Keck & Sikkink, 1998, hal. 97).

Dalam hal ini, ASNLF fase 1999-2005 telah gagal mendapatkan peluang dari politik akuntabilitas untuk menjamin Aceh tetap bebas dari Indonesia. Akan tetapi, dengan masih tetap eksisnya gerakan ASNLF di fase 2012-2019 tentunya, untuk mengawasi komitmen perdamaian yang dilakukan oleh RI-GAM pada tahun 2005. Kendati ASNLF sekarang beranggapan, jika dalam perundingan damai tersebut bukan faksi yang mewakili ASNLF namun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang membajak perjuangan gerakan ASNLF (Ali, 2019). Namun bagaimanapun dari tahun 1999-2019 dalam dua kepemimpinan yang berbeda, sampai saat ini ASNLF belum dapat mewujudkan komitmen ini dengan ‘aktor target’ yakni Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, setidaknya ada 4 (empat) upaya komitmen yang dijalankan oleh gerakan ASNLF ini dalam proses kemerdekaannya walau berakhir pada perdamaian. *Pertama*, pertemuan perundingan pada 12 Mei 2000 yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan. *Kedua*, pertemuan perundingan 9 Desember 2002 yang menyepakati kesepakatan *Cessation of Hostilities Agreement (COHA)*. *Ketiga*, pertemuan perundingan damai pada 19 Mei 2003. *Keempat*, pertemuan perundingan pada 12 Juli 2005 yang difasilitasi Crisis Management initiative (CMI).

Dalam analisis tipologi taktik ini, maka perlunya untuk meringkaskan secara sederhana melalui pembentukan olahan dalam tabel yang menunjukkan upaya dari Gerakan ASNLF dalam dua fase.

Tabel 1. Taktik Gerakan ASNLF 1999-2019 dalam teori *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Tipologi Taktik TAN	Ada	Tidak Ada	Keterangan
<i>Information Politics</i> (Fase Hasan Tiro 1999-2005)	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> <i>Pertama</i>, ASNLF dalam melancarkan informasi melalui para <i>political entrepreneurs</i>, ketika melakukan proses perekrutan hingga indoktrinasi sampai muncul aksi menuntut referendum tahun 1999. <i>Kedua</i>, mereka juga mempercundang Pemerintah dalam menerima dialog, agar dapat disorot oleh jurnalis asing ataupun aktor internasional lainnya.

<p><i>Information Politics</i> (Fase Arif Fadillah 2012-2019)</p>	-	✓	<ul style="list-style-type: none"> • ASNLF belum mampu menarik simpatik masyarakat, dan pada akhirnya informasinya yang disampaikan tidak strategis dalam mengklamin sebuah isu untuk membebaskan diri dari Indonesia.
<p><i>Symbol Politics</i> (Fase Hasan Tiro 1999-2005)</p>	✓	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertama</i>, ASNLF mengadopsi simbol-simbol pada masa kesultanan dahulu untuk diturunkan menjadi bagian dari lambang negaranya. • <i>Kedua</i>, ASNLF juga menyebarkan selebaran indoktrinisasi kepada masyarakat umum lewat klipng berjudul <i>Atjèh Bak Mata Dônja</i>.
<p><i>Symbol Politics</i> (Fase Arif Fadillah 2012-2019)</p>	-	✓	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertama</i>, ASNLF hanya meneruskan simbol politik yang telah dirancang oleh pendahulu, masyarakat juga masih meminati persoalan identitas lama dari perjuangan untuk membebaskan diri. • <i>Kedua</i>, ASNLF belum mampu menarik perhatian masyarakat Pasca MoU Helsinki 2005, sebab masyarakat juga belum mengetahui lebih dalam profile gerakan ini. Namun, mengetahui simbol-simbol tersebut merupakan perjuangannya gerakan di fase Hasan Tiro.

<p><i>Leverage Politics</i> (Fase Hasan Tiro 1999-2005)</p>	<p>✓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertama, moral leverage</i> ASNLF terbilang kurang untuk menekan aktor kuat dalam membantu agenda kemerdekaannya, walaupun mereka pada akhirnya menarik elemen lainnya seperti HDC dan CMI sebagai fasilitator dialog. • <i>Kedua, material leverage</i> ASNLF sangat didukung penuh oleh <i>political entrepreneurs</i> maupun warga lokal Aceh di Luar negeri dan di wilayahnya sendiri. Mereka terbilang sangat mampu dan efisien dalam menumbuhkan gerakan ini.
<p><i>Leverage Politics</i> (Fase Arif Fadillah 2012-2019)</p>	<p>✓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertama, moral leverage</i> ASNLF sangat tegas dalam posisinya di dunia internasional, terutama berani menyatakan sikap di depan Pemerintah Indonesia dan terbantu oleh perannya UNPO. • <i>Kedua, material leverage</i> ASNLF terbilang kurang didukung oleh masyarakat untuk dapat kolektik seperti Pra MoU Helsinki, karena dukungan dari masyarakat sudah tidak seperti dulu dan

			tidak lagi membayar iuran wajib kepada gerakan ini.
<i>Accountablity</i> <i>Politics</i> (Fase Hasan Tiro 1999-2005)	-	✓	<ul style="list-style-type: none"> • ASNLF telah gagal untuk menyepakati secara bersama komitmen untuk Aceh dapat bebas dari Indonesia. Namun, beberapa dialog untuk membicarakan komitmen tersebut telah diupayakan oleh gerakan ini.
<i>Accountablity</i> <i>Politics</i> (Fase Arif Fadillah 2012-2019)	-	✓	<ul style="list-style-type: none"> • ASNLF sampai saat ini belum tercapai dalam mereka dapat menyepakati komitmen bersama antara Indonesia dan Aceh untuk dapat bebas dari negaranya, akan tetapi mereka mempunyai jaminan untuk menjaga dan mengawasi komitmen perdamaian antara RI-GAM pada 2005 lalu. Jaminannya adalah melaporkan hal ini ke dunia internasional, jika negara melakukan pengingkaran pada butir-butir perdamaian tersebut.

Sumber: Diolah dari Tipologi Taktik TAN Keck & Sikkink (1999)

3.2 Indikator Penilaian Upaya ASNLF dalam Membebaskan Aceh dari Indonesia

Menurut Margaret Keck dan Karthryn Sikkink hasil dari pencapaian jaringan advokasi dinilai dari beberapa tahapan, (1) pembuatan isu dan perhatian atau setting agenda; (2) pengaruh sebuah jaringan pada posisi diskursif suatu negara atau organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh pada prosedur kelembagaan (4) pengaruh terhadap perubahan kebijakan kepada ‘aktor target’ berupa negara, organisasi internasional, regional atau MNC; dan (5) pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98).

Pertama, sejauh mana upaya dari jaringan ini dapat mengatur agendanya dalam memprovokasi perhatian domestik dan internasional pada masalah ini, terkhusus bagi media, debat, audiensi dan pertemuan internasional lainnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). *Kedua*, sejauh mana upaya dari jaringan ini dapat mempengaruhi posisi diskursif ‘aktor target’ yakni negara maupun dukungan internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). Sejahter mana upaya dari jaringan ini dapat memenuhi prosedur kelembagaannya untuk membuat sebuah komitmen yang mengikat dengan kesesuaian isu yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). *Keempat*, sejauh mana upaya dari jaringan ini dapat mempengaruhi perubahan kebijakan kepada ‘aktor target’ yakni negara, organisasi internasional Regional maupun MNC lainnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). *Kelima*, sejauh mana upaya dari jaringan ini dapat mempengaruhi perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98).

Maka, analisis penilaian ini akan dilihat dari pencapaiannya sampai di akhir tahun pembahasannya yakni tahun 2019. Gerakan ASNLF saat ini belum tercapai

keinginannya untuk membebaskan Aceh dari Indonesia, terkendala dari beberapa sebab. *Pertama*, upaya dari ASNLF untuk melakukan provokasi dalam perhatiannya pada isu ini untuk ditujukan kepada khalayak domestik dan internasional sangat fluktuatif, ASNLF pada fase Hasan Tiro sudah tercapai namun kembali pada fase Arif Fadillah belum tercapai dan mampu menarik dukungan perhatian media dan aktor lainnya. *Kedua*, pengaruh ASNLF pada fase Hasan Tiro dalam posisi diskursif kepada negara dan aktor internasional lainnya belum signifikan, adapun pada fase Arif Fadillah sudah cenderung cemerlang dalam agenda-agenda internasional, ketika mereka berani menyatakan sikap di depan aktor internasional lainnya maupun di hadapan Pemerintah Indonesia.

Ketiga, prosedur kelembagaan yang disiapkan oleh kedua fase ASNLF belum mampu dapat menyakinkan komitmen internasional maupun Pemerintah Indonesia, hal ini dibenarkan oleh salah satu perwakilan ASNLF dalam sebuah form wawancara penulis dengan mereka. *Keempat*, kedua fase ASNLF belum mampu membentuk wacana dan komitmen mereka untuk bebas dari Indonesia terutama dengan Pemerintah Indonesia maupun dukungan dari negara lain. *Kelima*, kedua fase ASNLF belum mampu hingga saat ini dapat merubah sedikitpun perilaku dari sebuah negara yakni Indonesia, negara pendukung dan *Non Governmental Organization* (NGO) lainnya.

Dengan demikian, dari berbagai penilaian tersebut ASNLF fase Hasan Tiro dan fase Arif Fadillah hanya mampu memenuhi satu dari lima indikatornya. Adapun, dari beberapa pengumpulan data yang dilakukan terdapat beberapa penemuan penting seperti perbedaan pendapat antara aktivis ASNLF antara faksi Dr. Husaini Hasan (MP-GAM) dan faksi Dr. Zaini Abdullah (GAM) maupun

mereka yang tidak terjaring dan terafiliasi dengan ASNLF masa 1999-2005 yang sekarang tengah melanjutkan organisasi ini di Eropa di bawah kepemimpinan Arif Fadillah (ASNLF 2012-2019), mereka juga skeptis kepada kedua perpecahan tersebut antara faksi MP-GAM dan GAM serta tidak menerima kedatangan mereka menjadi anggota organisasi.

